

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam pembangunan perekonomian Indonesia, masalah kesempatan kerja merupakan suatu masalah pokok yang sampai saat ini sangat sulit untuk diatasi. Hal ini terjadi dikarenakan adanya suatu masalah kesenjangan dan ketimpangan di dalam struktur pengelolaan di dalam mendapatkannya. Di pulau Sumatera terjadinya keterlambatan dalam pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh keadaan nilai mata uang yang tidak stabil, dan lemahnya sumber daya manusia dalam mengelola sumber daya alam di Pulau Sumatera.

Pulau Sumatera merupakan pulau terbesar keenam di dunia yang terletak di Indonesia. Pulau Sumatera menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia setelah Pulau Jawa. Hal tersebut ditunjukkan oleh mulai tumbuhnya ekonomi di Pulau Sumatera pada tahun 2022 sebesar 4,69% dengan kontribusi sebesar 22,04% ke pertumbuhan ekonomi nasional. Pulau Sumatera terdiri dari sepuluh provinsi, yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Lampung, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Sumatera Barat. Provinsi-provinsi tersebut mengalami keterbatasan lapangan pekerjaan yang menyebabkan banyaknya pengangguran dan angkatan kerja tetapi lapangan pekerjaan yang tersedia belum memadai.

Setelah krisis ekonomi pada tahun 1997 pertumbuhan ekonomi Indonesia diiringi dengan berkembangnya sektor-sektor perekonomian, salah satunya adalah sektor industri. Sektor industri merupakan komponen utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Sektor industri tidak saja berpotensi memberikan kontribusi ekonomi dalam menciptakan nilai tambah, lapangan pekerjaan dan devisa tetapi juga mampu memberikan kontribusi yang besar dalam transformasi struktural

bangsa ke arah modernisasi. Oleh karena itu sektor industri menjadi salah satu sektor penggerak pembangunan ekonomi di suatu daerah termasuk di Pulau Sumatera.

Sektor industri dalam penyerapan tenaga kerja dapat digambarkan dari tingkat permintaan tenaga kerja pada suatu perusahaan industri. Permintaan perusahaan terhadap tenaga kerja didefinisikan sebagai permintaan turunan dari permintaan konsumen terhadap output atau produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Sehingga dapat diartikan bahwa permintaan perusahaan terhadap tenaga kerja ditentukan oleh permintaan konsumen terhadap output perusahaan. Apabila permintaan terhadap output perusahaan meningkat maka akan menyebabkan permintaan tenaga kerja meningkat pula. Hal tersebut disebabkan oleh perusahaan yang memproduksi menginginkan untuk memenuhi permintaan konsumen terhadap output perusahaan produksi (Qarimah, 2023).

Keberhasilan suatu industri dapat digambarkan melalui tingkat keuntungan suatu industri itu sendiri yang dapat memenuhi kewajiban dan berpotensi untuk berkembang. Dimana perkembangan industri sebagian besar dipengaruhi oleh tenaga kerja dimana apabila semakin baik produktivitas tenaga kerja, maka hasil produksi juga akan semakin banyak.

Terdapat empat kelompok sektor industri di Indonesia yang terdiri dari industri besar, sedang, kecil, dan rumah tangga. Dalam sektor industri pengolahan, industri skala besar dan sedang menjadi kontributor output terbesar. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini berfokus pada industri pengolahan besar dan sedang yaitu industri CPO di Pulau Sumatera yang terkonsentrasi pada Provinsi Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jambi dan Sumatera Barat.

Sebagai komoditas unggulan, pengembangan industri kelapa sawit di Pulau Sumatera sangatlah prospektif. Industri ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan nasional dan penerimaan devisa dan ekspor non migas. Serta dapat berperan sebagai produsen bahan baku untuk

penciptaan nilai tambah di sektor industri dan jasa yang menjadi tujuan akhir kegiatan perusahaan. Berikut ini dapat dilihat perkembangan luas lahan dan hasil produksi kelapa sawit yang ada di Pulau Sumatera.

**Tabel 1.1 Luas Lahan dan Nilai Produksi Kelapa Sawit Menurut Provinsi di Pulau Sumatera Periode 2020-2022**

No.	Provinsi	2020		2021		2022	
		Luas Lahan (Ha)	Nilai Produksi (Ton)	Luas Lahan (Ha)	Nilai Produksi (Ton)	Luas Lahan (Ha)	Nilai Produksi (Ton)
1	Aceh	470.004	1.027.298	476.660	1.066.972	499.778	1.099.018
2	Sumatera Utara	1.286.623	5.200.864	1.285.828	5.301.912	1.347.520	5.453.030
3	Sumatera Barat	416.334	1.298.653	430.420	1.351.950	451.371	1.393.896
4	Riau	2.862.132	8.863.931	2.860.832	8.785.327	2.999.743	9.059.611
5	Kepulauan Riau	7.393	19.753	7.378	18.018	7.744	18.515
6	Jambi	1.083.746	2.639.894	1.083.930	2.637.194	1.136.367	2.720.529
7	Sumatera Selatan	1.042.241	3.279.094	1.058.586	3.181.390	1.110.180	3.281.115
8	Kep. Bangka Belitung	237.171	803.321	238.591	800.362	250.376	823.176
9	Bengkulu	318.352	1.066.171	319.371	1.152.654	334.881	1.190.068
10	Lampung	183.814	356.719	192.603	420.715	201.959	433.637
<b>Pulau Sumatera</b>		<b>7.907.810</b>	<b>24.555.698</b>	<b>7.954.197</b>	<b>24.716.493</b>	<b>8.339.918</b>	<b>25.472.593</b>

*Sumber : Direktorat Jendral Perkebunan*

Berdasarkan tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa Pulau Sumatera memiliki Provinsi Riau di peringkat pertama sebagai salah satu provinsi yang paling produktif dalam produksi CPO di Indonesia. Dimana pada tahun 2022 Provinsi Riau memproduksi sebanyak 9.059.611 ton CPO. Meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya sebanyak 8.785.327 ton CPO.

Menurut data statistik unggulan 2022, di Pulau Sumatera terdapat lima provinsi yang termasuk sebagai sepuluh sentra produsen sawit di Indonesia. Adapun provinsi tersebut yaitu Provinsi Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jambi, dan Sumatera Barat.

Provinsi Riau memiliki pangsa pasar sebesar 21%, Riau berkontribusi signifikan terhadap produksi CPO nasional. Posisi kedua yaitu Provinsi Sumatera Utara yang memiliki perkebunan kelapa sawit yang luas dan merupakan salah satu wilayah dengan pangsa pasar CPO sebesar 13%. Produksi CPO di Sumatera Utara turut berperan dalam mencukupi permintaan domestik maupun internasional. Kemudian di posisi ketiga diduduki oleh Provinsi Sumatera Selatan yang juga merupakan salah satu produsen CPO terbesar di Indonesia dengan pangsa pasar 8%. Provinsi ini memiliki kondisi geografis dan iklim yang mendukung untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit.

Perusahaan dalam memperluas kegiatan industri untuk memperbanyak lapangan pekerjaan salah satunya dipengaruhi oleh jumlah unit usaha. Pertumbuhan jumlah unit usaha pada industri pengolahan besar dan sedang akan meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan sehingga apabila jumlah perusahaan pada suatu industri bertambah, permintaan terhadap tenaga kerja akan meningkat (Auliadina, 2019).

Pada tahun 2022 Provinsi yang memiliki jumlah unit usaha terbanyak yaitu Provinsi Riau dengan jumlah unit usaha industri CPO sebanyak 183 perusahaan. Dan pada posisi kedua diduduki oleh Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah unit usaha sebanyak 135 perusahaan. Sedangkan Provinsi Sumatera Barat hanya memiliki sebanyak 34 perusahaan industri CPO pada tahun 2022, dimana hal tersebut telah mengalami penurunan dari tahun 2021 yang berjumlah 38 perusahaan.

Provinsi dengan jumlah tenaga kerja industri CPO terbanyak pada tahun 2022 adalah Provinsi Riau yaitu sebanyak 22.557 orang. Di posisi kedua yaitu Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 21.948 orang. Provinsi

Sumatera Selatan menduduki posisi ketiga dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 15.734 orang. Selanjutnya yaitu Provinsi Jambi dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 7.700 orang. Dan Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah tenaga kerja industri CPO sebanyak 4.387 orang.

Berdasarkan gambaran diatas, dapat disimpulkan bahwa jumlah tenaga kerja pada industri CPO mengalami fluktuasi yang beragam selama enam tahun. Berfluktuasinya jumlah tenaga kerja setiap provinsi dapat diakibatkan oleh rendahnya kinerja dan produktivitas tenaga kerja, serta kepercayaan para investor untuk menggunakan jasa tenaga kerja. Oleh sebab itu, kinerja dan produktivitas setiap tenaga kerja dijadikan penentu kondisi permintaan tenaga kerja. Sehingga kinerja yang rendah dan produktivitas yang rendah akan menyebabkan perusahaan memutuskan hubungan kerja dengan para pekerja sehingga menyebabkan tenaga kerja setiap tahunnya mengalami fluktuasi (Hasibuan, 2021). Dalam penggunaan tenaga kerja, perusahaan akan melakukan pilihan mengenai pemakaian jumlah tenaga kerja yang optimal tergantung pada harga input tenaga kerja itu sendiri. Selain itu, jumlah tenaga kerja yang akan digunakan juga dipengaruhi oleh harga input yang lain seperti modal (Hendra, dkk., 2013).

Kebijakan upah minimum dapat pula menjadi perkara dalam ketenagakerjaan sehingga menimbulkan terjadinya pengangguran. Adapun masalah upah minimum sudah menjadi isu krusial di Indonesia, terkhususnya provinsi-provinsi di Pulau Sumatera. Menurut Auliadina (2019) kenaikan upah minimum secara signifikan menyebabkan beberapa pengusaha merelokasi ke daerah lain dengan upah minimum yang lebih kecil yang dikarenakan tidak dapat membiayai tenaga kerjanya sehingga hal tersebut berpotensi menaikkan tingkat pengangguran khususnya sektor informal.

Sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 upah minimum sektor industri pengolahan mengalami fluktuasi. Dari kelima provinsi di atas, dapat diketahui bahwa Provinsi Riau memiliki upah minimum sektoral tertinggi pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp 3.388.825. Dan Sumatera Barat dengan upah minimum terendah

yaitu sebesar Rp 2.466.966. Menurut teori permintaan tenaga kerja, jumlah tenaga kerja yang diminta akan menurun sebagai penyebab dari kenaikan upah. Jika upah mengalami kenaikan, sedangkan harga input tetap dapat diartikan bahwa harga tenaga kerja relatif lebih tinggi daripada harga input sehingga dapat menyebabkan perusahaan untuk mengurangi kuantitas tenaga kerja untuk dapat mempertahankan laba maksimum (Nopeline, 2015).

Selain upah, harga output juga berpengaruh terhadap permintaan tenaga kerja pada Industri CPO. Harga memiliki hubungan dengan permintaan tenaga kerja karena tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Berdasarkan hukum permintaan, semakin tinggi harga suatu barang maka semakin sedikit unit yang diminta, sehingga harga produk yang lebih tinggi akan mengakibatkan permintaan tenaga kerja lebih rendah. Sebaliknya, harga produk yang lebih rendah menghasilkan kuantitas yang diminta lebih tinggi, dan juga menyebabkan lebih banyak permintaan terhadap tenaga kerja untuk memproduksi barang tersebut.

Sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 harga CPO mengalami fluktuasi. Dari kelima provinsi di atas, dapat diketahui bahwa Provinsi Riau memiliki harga CPO tertinggi pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp 12.613. Tetapi harga tersebut telah mengalami penurunan sebesar Rp 423. Sedangkan Provinsi Sumatera Utara menjadi provinsi dengan harga CPO terendah diantara kelima Provinsi pada tahun 2022. Harga CPO di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 10.958.

Masalah tenaga kerja merupakan masalah yang sangat kompleks dan besar. Kompleks karena masalahnya mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berinteraksi dengan pola yang tidak selalu mudah dipahami. Besar dikarenakan menyangkut jutaan jiwa orang. Untuk menggambarkan masalah tenaga kerja dimasa yang akan datang tidaklah mudah karena disamping mendasarkan pada angka tenaga kerja di masa lampau, harus juga diketahui prospek produksi di masa mendatang. Kondisi kerja yang baik, kualitas output

yang tinggi, upah yang layak serta kualitas sumber daya manusia merupakan persoalan yang selalu muncul dalam pembahasan tentang tenaga kerja disamping masalah industrial antara pekerja dan dunia usaha. Dalam penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa kejelasan adanya hubungan yang bersifat saling mempengaruhi antara kondisi perekonomian dengan pasar tenaga kerja.

Perubahan yang terjadi setiap tahunnya terhadap permintaan tenaga kerja khususnya pada sektor industri CPO tidak terlepas dari beberapa faktor seperti jumlah unit usaha, upah minimum sektoral, nilai produksi CPO dan harga CPO. Melihat fenomena tersebut berdasarkan uraian diatas terkait dengan permintaan tenaga kerja pada industri CPO di Provinsi Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jambi dan Sumatera Barat, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait “**Determinan Permintaan Tenaga Kerja Pada Industri CPO (*Crude Palm Oil*) di Pulau Sumatera**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan jumlah unit usaha dan jumlah tenaga kerja, upah minimum sektor industri pengolahan, nilai produksi dan harga CPO pada sektor industri CPO di Pulau Sumatera periode 2017-2022?
2. Bagaimana pengaruh jumlah unit usaha, upah minimum pada industri pengolahan, nilai produksi dan harga CPO terhadap permintaan tenaga kerja pada sektor industri CPO di Pulau Sumatera periode 2017-2022?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan jumlah unit usaha dan jumlah tenaga kerja, upah pada industri pengolahan, nilai produksi dan harga CPO pada sektor industri CPO di Pulau Sumatera periode 2017-2022.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh jumlah unit usaha, upah pada industri pengolahan, nilai produksi dan harga CPO terhadap permintaan tenaga kerja pada sektor industri CPO di Pulau Sumatera periode 2017-2022.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi serta menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya agar lebih tertarik untuk meneliti dan mengembangkan lebih lanjut mengenai penelitian ini.

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil suatu kebijakan atau keputusan khususnya dalam mengatasi permasalahan ekonomi di Pulau Sumatera khususnya masalah penyerapan tenaga kerja di sub sektor industri CPO.